

BAB III

REZIM INTERNASIONAL DALAM GENDER EQUALITY

Penulis disini akan menjelaskan tentang regime internasional dan proses *gender equality* ditingkat global yang menjadi gerbang munculnya *gender equality* di Arab Saudi seperti ratifikasi CEDAW tahun 2000 hingga UNESCO.

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), *regime* didefinisikan sebagai pengaturan sebuah *governance* yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasional. aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu dapat berupa politik, ekonomi bahkan tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia meliputi hak sipil bahkan tentang *gender equality*. Regime internasional yang mempengaruhi Arab Saudi dalam perubahan *gender equality* yaitu :

A. HAM (Hak Asasi Manusia) Secara Umum

Dapat diketahui bahwa secara internasional, perlindungan Hak Asasi Manusia di pegang oleh PBB. PBB memiliki banyak bagian yang membahas tentang Hak Asasi manusia. UNESCO, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ILO atau *International Labour Organization*. Dan organisasi non-pemerintah FIDH (*Federación Internacional de Derechos Humanos*).

UNESCO dibentuk oleh PBB pada tahun 1945. UNESCO atau *United Nations Educationa* dibentuk bertujuan mengutamakan perdamaian dan keamanan. Keamanan yang

dimaksud adalah dengan cara kerjasama dengan negara lain melalui budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa hormat terhadap setiap negara yang tetap dalam aturan yaitu adil, bebas dan berdasarkan HAM.

Arab Saudi mulai menjadi member dari UNESCO setahun setelah di bentuk yaitu tahun 1946. Selama menjadi member Arab Saudi termasuk anggota yang aktif seperti pada tahun 2012 UNESCO mengunjungi universitas pertama di Arab Saudi yaitu Universitas Putri Nurah binti Abdurrahman. Universitas ini adalah universitas terbesar wanita pertama di dunia (University, t.thn.).

Kemudian Arab Saudi juga meratifikasi Konvensi UNESCO tentang penentangan diskriminasi dalam pendidikan bahwa wanita dan pria di bebaskan untuk menempuh pendidikan tanpa ada aturan apapun dan dengan memberikan fasilitas penyedia staf pengajar dengan kualifikasi dengan standar yang sama dan juga bangunan dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) merupakan dokumen yang bersejarah milik PBB. UDHR berisi tentang hak-hak individu. UDHR adalah awal terbentuknya RUU Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Human Rights*) yang mulai berlaku sejak 1976. UDHR memiliki 30 pasal yang mana ada semua berisi ketentuan-ketentuan dalam hak-hak individu. Dilanjutkan dengan bahwa Arab Saudi melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 13 tentang setiap orang bebas untuk bergerak dan tinggal dimana saja.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Piagam Arab Saudi tentang Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh Arab Saudi, setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara mereka. Pembatasan apa pun hanya dapat bersifat perorangan, karena

alasan yang sah, dan proporsional - seperti, misalnya, selama investigasi kriminal.

ILO atau *International Labour Organization* adalah sebuah organisasi yang membahas tentang isu buruh dan masih berada di bawah naungan PBB. ILO dibentuk pada tahun 1919 (Organization, t.thn.). Arab Saudi masuk dalam anggota ILO sejak 1976 dilanjutkan dengan bahwa Arab Saudi telah meratifikasi 16 ILO. ILO disini bekerja sebagai badan bantuan dalam hal membantu Arab Saudi untuk mengatasi masalah perindustriannya. Masalah bagi Arab Saudi adalah pasar tenaga kerja yang rendah dari tingkat nasional dan dalam sektor swasta serta tata kelola imigrasi lalu tentang kapasitas kebijakan yang konservatif sehingga mayoritas yang bekerja hanyalah pria.

Dalam Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan bahwa Sejak 1991 Arab Saudi telah di tegur karena Komite Pakar ILO telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang kebijakan pemerintah tentang pemisahan jenis kelamin di tempat kerja yang dikodifikasikan dalam bagian 160 dari Kode Perburuhan 1969.

FIDH (*Federación Internacional de Derechos Humanos*) adalah organisasi non-pemerintah atau LSM tentang Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 112 negara. FIDH sekarang dipimpin oleh Alice Mogwe seorang wanita yang berasal dari Afrika Selatan (fidh, International Federation for Human Rights, 2019). Banyak negara yang menjadi bagian dari FIDH seperti Afrika Selatan, Peru, Perancis dan Palestina.

FIDH berfokus pada banyak hal tentang Hak Asasi manusia terutama tentang wanita. FIDH mempromosika wanita dalam prioritas mereka. Hal-hal yang menjadi prioritasnya adalah :

1. Mendokumentasikan pelanggaran hak-hak wanita;
2. Melakukan advokasi untuk penghapusan undang-undang diskriminatif dan melindungi wanita dari diskriminasi dan kekerasan;
3. Mengaktifkan mekanisme perlindungan hak-hak wanita regional dan internasional;

4. Mendukung dan mewakili korban kekerasan seksual dalam proses hukum

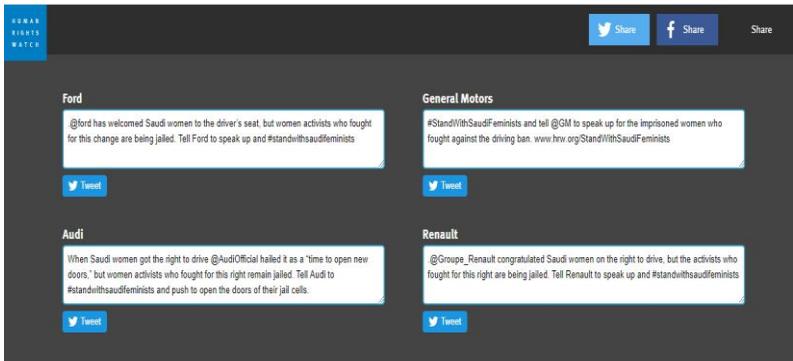
Walaupun Arab Saudi tidak bagian dari anggota FIDH namun FIDH berhak untuk ikut campur dalam hal Hak Asasi Manusia apabila masalah wanita di Arab Saudi yang mendapat batasan begitu keras. FIDH yang merupakan memprioritaskan wanita merasa bahwa seharusnya Arab Saudi melonggarkan aturan yang ada.

Organisasi non-pemerintah FIDH pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan, seperti Loujain Al-Hathlou yang sekarang statusnya telah dibebaskan dengan bantuan IFDH (fidh, 2019).

Human Rights Watch (HRW) adalah organisasi non-pemerintah internasional yang melakukan penelitian dan advokasi tentang hak asasi manusia. HRW menekan beberapa pemerintah, pembuat kebijakan dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mengancam pelecehan dan menghormati hak asasi manusia, dan kelompok itu sering bekerja atas nama pengungsi, anak-anak, migran, dan tahanan politik. HRW telah berdiri 41 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1978

Meskipun ada langkah besar yang dibuat oleh gerakan hak-hak wanita internasional selama bertahun-tahun, wanita dan gadis di seluruh dunia masih menikah sebagai anak-anak atau diperdagangkan ke dalam kerja paksa dan perbudakan seks. Mereka ditolak akses ke pendidikan dan partisipasi politik, dan beberapa terjebak dalam konflik di mana pemerkosaan dilakukan sebagai senjata perang. Di seluruh dunia, kematian yang terkait dengan kehamilan dan persalinan sangat tinggi, dan wanita dicegah membuat pilihan yang sangat pribadi dalam kehidupan pribadi mereka. Human Rights Watch bekerja menuju realisasi pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender yaitu melindungi hak dan meningkatkan kehidupan wanita dan anak wanita di lapangan (Muscati, 2014)

Human Rights Watch menggambarkan posisi wanita Saudi tidak berbeda dari menjadi anak di bawah umur, dengan sedikit otoritas atas kehidupan mereka sendiri. Wali berhak untuk membuat sejumlah keputusan penting atas nama seorang wanita. Ini termasuk memberikan persetujuan bagi wanita tersebut untuk memegang beberapa jenis izin usaha, untuk belajar di universitas atau perguruan tinggi dan untuk bekerja jika jenis bisnisnya tidak "dianggap sesuai untuk seorang wanita." Bahkan ketika persetujuan wali tidak disyaratkan secara hukum, beberapa pejabat masih akan memintanya. Bahkan, *Human Rights Watch* juga mendukung aktifis agar perwalian dihapuskan.



Sumber diolah oleh *Human Rights Watch, 2017*(*Human RightsWatch, 2017*)

Dalam gambar tersebut, HRW mengajak untuk seluruh dunia membuat #standwithsaudifeminists dan mengirim kepada perusahaan mobil yang ada di Arab Saudi karena 13 aktivis hak-hak wanita terkemuka dan menuduh beberapa dari mereka melakukan kejahatan berat yang tampaknya terkait langsung dengan aktivisme mereka. Setidaknya sembilan wanita terus ditahan tanpa dakwaan, beberapa di antaranya menunggu persidangan yang bisa membuat mereka menghadapi 20 tahun penjara. Ini adalah serangan paling serius terhadap aktivisme hak-hak wanita (Watch, Human Rights Watch, t.thn.).

Tahun 2016 Human Rights Watch menghasilkan laporan yang menyoroti berbagai pembatasan yang dihadapi wanita Saudi. Wanita dewasa harus mendapatkan izin dari wali pria untuk bepergian, menikah, atau keluar dari penjara. Mereka mungkin diminta untuk memberikan izin wali untuk bekerja atau mengakses layanan kesehatan. Wanita secara teratur menghadapi kesulitan melakukan berbagai transaksi tanpa kerabat laki-laki, mulai dari menyewa apartemen hingga mengajukan tuntutan hukum. "Kita semua harus hidup di perbatasan kotak yang diambil ayah atau suami kita untuk kita," kata Zahra, seorang wanita Saudi berusia 25 tahun. (Alexander, 2017). Human Rights Watch, seperti dikutip voaindonesia.com, pernah melaporkan jauhnya tempat pendaftaran pemilih dan keharusan adanya kartu tanda pengenal yang tidak dimiliki banyak wanita, menghambat proses pemilu itu. (Sotyati, 2015)

B. CEDAW (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women)

Dalam perkembangan Arab Arab ditahun 2000, Arab Saudi mengalami proses pengaruh yang tidak seperti di tahun-tahun sebelum masa pemerintahan raja Abdul Saud. Pada masa pemerintahan Raja Abdul Saud di tahun 2000 melakukan ratifikasi konvensi PBB yang sebelumnya Arab Saudi tetep teguh pada pendiriannya untuk tetap mengutamakan tujuannya sebagai negara yang konservatif, namun seiring berjalannya waktu Arab Saudi melakukan suatu tindakan dalam proses *gender equality* dalam CEDAW ditahun 2000 yang tepatnya sejak 7 september 2000..

CEDAW (*The Committee on (The United Nations High Commissioner for Refugees, 2000) the Elimination of Discrimination against Women*) adalah badan yang menangani dan melindungi tentang diskriminasi terhadap wanita dalam bentuk perjanjian. CEDAW sendiri adalah badan yang masih berada di bawah naungan PBB yang ditetapkan pada tahun 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September

1981 (fanack.com, 2019). CEDAW berlokasi di New York (OHCHR, t.thn.). disetujui selama Sidang Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1979 Dalam aturan, apabila negara telah melakukan ratifikasi maka negara tersebut wajib untuk mengikuti semua aturan yang ada. Termasuk Arab Saudi dalam melakukan ratifikasi CEDAW. Semua aturan yang telah dibuat oleh CEDAW maka Arab Saudi diwajibkan untuk mengikuti aturannya. Seperti :

1. CEDAW Dalam Pasal 5 (a) konvensi yaitu mewajibkan Arab Saudi untuk memodifikasi dan menghapus sistem superior pria dan wanita;
2. CEDAW mengenai adanya aturan perwalian terhadap wanita makan menurut pasal 15 bahwa wanita di bebasakan dalam hal hukum yang mana tidak hanya pria yang mendapat kapasitas hukum,namun wanita juga;
3. CEDAW Pasal 15 (4) yaitu membebaskan wanita untuk bebas memilih warganegara dan tempat tinggal, bebas dalam layanan umum serta bebas untuk menikah;
4. CEDAW pasal 16 (f) menjelaskan bahwa Arab Saudi harus memastikan bahwa wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab terhadap adopsi anak, perwalian, dan kewaspadaan;
5. CEDAW pasal 11 bahwa wali perlu memberikan ijin kepada wanita tentang bekerja secara bebas

